

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pariwisata yaitu aktivitas yang dilengkapi oleh lembaga serta layanan masyarakat, kewirausahaan, negara bagian dan lokal. Industri pariwisata ialah satu diantara sumber devisa utama negara. Menurut badan statistika menuturkan bahwasanya, pendapatan negara dari kunjungan wisatawan mancanegara menjadi pendapatan nasional melalui sektor pariwisata. Pariwisata merupakan penghasil devisa paling besar ketiga Indonesia sesudah kelapa sawit dan batu bara.

**Tabel 1.1 Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Devisa Sektor
Pariwisata di Indonesia**

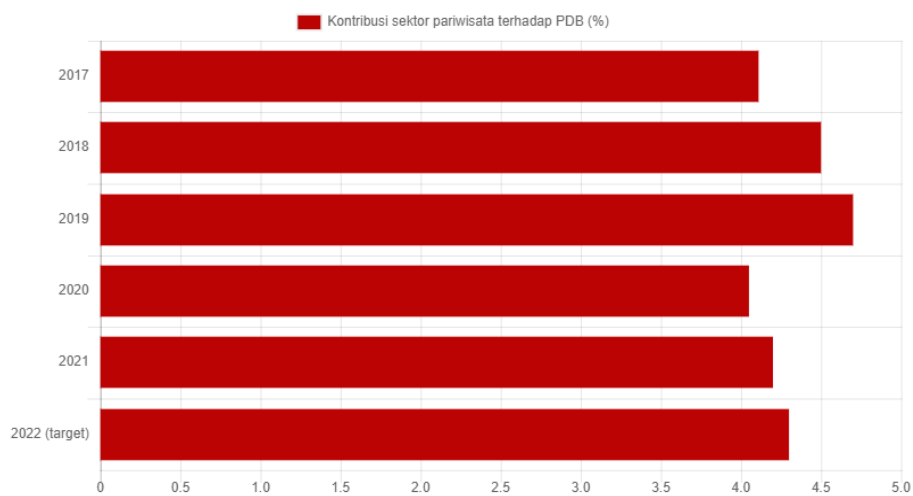
No.	Tahun	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Jumlah Devisa Sektor Pariwisata
1.	2019	16.106.954 jiwa	16,9 miliar dolar AS
2.	2020	4. 052.923 jiwa	3,2 miliar dolar AS
3.	2021	1.557.530 jiwa	0,36 miliar dolar AS

Sumber : Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Berdasarkan data jumlah wisatawan mancanegara (wisman) dan total devisa negara sektor pariwisata di tahun 2019 – 2021 pada tabel 1.1 jumlah wisman dari tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan hingga 74,8 persen sedangkan jumlah devisa negara turun 81 persen kondisi tersebut diakibatkan adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan munculnya penerapan kebijakan terkait pembatasan sosial. Penurunan jumlah wisatawan

mancanegara juga masih terjadi pada tahun 2021 sehingga menyebabkan turunnya sumbangan devisa negara dari sektor pariwisata. Di tahun 2022 dalam rangka pemulihan ekonomi pemerintah Indonesia menargetkan peningkatan nilai devisa negara sektor pariwisata mencapai 1,7 miliar dolar AS atau setara dengan 24 miliar rupiah.

Gambar 1.1 Kontribusi Sektor Pariwisata dalam PDB



Sumber : Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Apabila dilihat dari data kontribusi sektor pariwisata pada Produk Domestik Bruto (PDB) di tahun 2020 hanya sekitar 4,05 persen setelah di tahun 2019 mencapai 4,7 persen. Namun, di tahun 2021 kontribusi sektor pariwisata dalam PDB berhasil merangkak naik mencapai 4,2 persen. Jika kebijakan dalam sektor pariwisata dapat dikelola dengan baik dalam menaikkan intensitas kunjungan wisatawan nusantara serta mancanegara maka akan memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia bahkan menjadi tiang utama pembangunan ekonomi nasional.

Menurut Wardoyo dan Bahrudin (dalam Marlina, 2019:18) sektor pariwisata memiliki andil krusial untuk pembangunan yakni dari aspek

ekonomi berperan menjadi pendorong perekonomian, dari aspek sosial bisa menjadi alternatif penyedia lapangan pekerjaan termasuk menyerap tenaga kerja lokal, kemudian dilihat dari aspek kebudayaan dapat menjadi wadah agar eksistensi budaya lokal dapat terus berkembang.

Salah satu strategi pembangunan ekonomi di negara berkembang adalah melalui sektor pariwisata dimana dapat memberdayakan ekonomi masyarakat dan terdapat kesempatan peluang terciptanya lapangan pekerjaan baru seperti terbukanya kesempatan berwirausaha kuliner khas, jasa penginapan, jasa transportasi, dll. Torres dan Momsen (dalam Zainuri, 2021:138) menyatakan bahwa pariwisata merupakan peluang industri dalam menciptakan devisa, memancing investasi asing, menaikkan pendapatan pajak, serta membuka lapangan pekerjaan baru apabila dapat digali dan dikelola dengan baik di setiap pariwisata yang ada di Indonesia sebagai negara kepulauan dan memiliki banyak keanekaragaman budaya lokal. Nwokorie (dalam Zainuri, 2021:138) berpendapat bahwa pariwisata adalah dimensi sosial dalam pengurangan kemiskinan di negara berkembang.

Pandemi Covid-19 yang muncul pada pertengahan Maret 2020 menyebabkan banyak sektor ikut terdampak, tidak terkecuali sektor pariwisata yang sangat terpuruk. Hal ini juga menyebabkan kemiskinan bertambah karena ketidaksiapan pemerintah Indonesia dalam menghadapi dampak yang timbul. Kabupaten Banyumas merupakan satu diantara lima kabupaten dan kota yang tergolong prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah, dengan tingkat kemiskinan ekstrem 6,83%. Hal ini karena kondisi geografis wilayah

Banyumas yang luas, serta terdapat 29.000 kepala keluarga atau 109.000 jiwa penduduk yang menjadi perhatian pemerintah pusat.

Tabel 1.2 Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas

Kemiskinan	Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas		
	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk Miskin	211,6 ribu jiwa	225,8 ribu jiwa	232,9 ribu jiwa
Persentase Penduduk Miskin	12,53%	13,26%	13,66%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas

Dilihat dari tabel 1.2, peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 penduduk miskin sebanyak 225,84 ribu jiwa atau 13,26% dibandingkan tahun sebelumnya pada 2019 yaitu 211,60 ribu jiwa atau 12,53% pada tahun 2021 angka kemiskinan di Kabupaten Banyumas juga masih mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Kabupaten Banyumas menargetkan penurunan kemiskinan sebesar 0,6 persen di setiap tahun.

Bersumber UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata mengamanatkan bahwa pembangunan pariwisata berperan dalam mengentaskan kemiskinan dengan peningkatan kesempatan berusaha dan memberdayakan kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan hambatan kehidupan dalam negeri, nasional maupun internasional. Pembangunan pariwisata pada suatu daerah dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah contohnya meningkatkan pemasukan masyarakat, meningkatkan perolehan devisa, meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan penerimaan pajak pemerintah dan laba BUMN, dan lain-lain (Saputra, 2012:20). Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu

tujuan wisata yang begitu populer di nusantara dan telah ditetapkan sebagai provinsi yang menjadi bagian dari program pariwisata nasional atau “*Ten Destination Other Bali*”. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan asing serta domestik di tahun 2024.

Kabupaten Banyumas merupakan kabupaten yang aktif dalam mengencarkan industri pariwisata. Saat ini industri pariwisata di Banyumas masih mengandalkan wisata alamnya dan beberapa budaya khas yang masih dapat dikembangkan karena memiliki ciri khas tersendiri. Perpaduan daya tarik wisata alam, wisata budaya, serta wisata buatan menjadi peluang untuk menumbuhkan desa wisata.

Desa wisata merupakan perpaduan diantara atraksi, akomodasi, serta layanan pendukung yang ditampilkan pada struktur hidup masyarakat yang terintegrasi pada praktik serta tradisi yang berjalan. Di tahun 2023 sudah terdapat 21 desa wisata di Kabupaten Banyumas dengan tiga kriteria yaitu rintisan, berkembang, dan maju. Desa Wisata Cikakak menjadi satu-satunya desa wisata dengan kategori maju di Kabupaten Banyumas. Hal ini dibuktikan melalui Keputusan Bupati Banyumas Nomor /556/166/Tahun 2020. Selain itu, Desa Wisata Cikakak dijadikan sebagai desa adat oleh Kementerian Dalam Negeri di tahun 2011 sebagai bagian dari *pilot project* dalam usaha melestarikan adat dan budaya nusantara.

Desa Cikakak memiliki luas 595.400 ha dengan topografi pegunungan. Desa Wisata Cikakak ialah salah satu diantara desa di Indonesia yang

mempunyai keunikan ciri khas dan kearifan lokal desa setempat yang masih terjaga. Desa Wisata Cikakak mempunyai peluang pariwisata yang beragam dari potensi alam yang masih alami serta memiliki nilai jual, warisan tradisi budaya, serta religi yang masih kental karena menjadi tempat berdirinya masjid tertua di Indonesia yaitu Masjid Saka Tunggal.

Pengelolaan wisata di Desa Wisata Cikakak dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pengelola manajemen oleh BUMDes Mitra Usaha Sejahtera, sedangkan untuk pengelola lapangan oleh Pokdarwis Saka Tunggal. Selain itu, pengembangan Desa Wisata Cikakak melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung untuk memberdayakan masyarakat setempat melalui gotong royong memanfaatkan potensi wilayah desa yang ada dengan tetap memperhatikan kearifan lokal agar dapat tetap dilestarikan. Tujuan lainnya adalah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.

Tabel 1.3 Alokasi Dana Desa Untuk Pariwisata Desa Cikakak

No.	Tahun	Alokasi Dana Desa
1.	2020	Rp 50.000.000
2.	2021	Rp 103.206.000
3.	2022	Rp 85.000.000

Sumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cikakak

Bersumber tabel 1.3, alokasi dana desa (ADD) untuk pengembangan pariwisata di Desa Cikakak dalam tiga tahun terakhir terlihat fluktuasi dimana pada tahun 2021 memiliki nilai tertinggi mencapai Rp 103.206.000 dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 2020 yang hanya mencapai Rp 50.000.000 dan tahun berikutnya di 2022 hanya Rp 85.000.000. Hal tersebut

karena di tahun 2021 Pemerintah Desa Cikakak melakukan pengembangan sarana dan prasarana baru di lokawisata seperti toilet, pembuatan patung kera sebagai simbolis Desa Wisata Cikakak, dan lainnya sesuai dengan yang disampaikan oleh Kaur Keuangan Pemerintah Desa Cikakak pada 30 Januari 2023,

“Alokasi dana desa untuk pariwisata di tahun 2021 lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tahun 2020 maupun 2022, hal tersebut karena Pemerintah Desa berfokus untuk mengembangkan sarana dan prasana baru di lokasi wisata yang bertujuan guna memaksimalkan daya tarik wisatawan. Selain itu, di tahun tersebut juga kami mengikuti beberapa kompetisi desa wisata seperti Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI.”

Keistimewaan potensi dan pengelolaan Desa Cikakak mengantarkan desa ini memperoleh beberapa penghargaan seperti Desa Wisata Terbaik Jawa Tengah Tahun 2021 dan termasuk kategori 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021. Kemenparekraf menggunakan tujuh kriteria dalam penilaian penghargaan ADWI yaitu, *Cleanliness Health, Safety, and Environment Sustainability* (CHSE), desa digital, *souvenir* (kuliner, *fashion*, kriya), daya tarik wisata (budaya, buatan, alam), *homestay*, konten kreatif, serta toilet.

Dari tujuh kriteria yang digunakan terdapat beberapa kriteria yang belum terpenuhi oleh Desa Cikakak. Salah satunya adalah belum tersedianya sertifikat CHSE, terkendalanya pengembangan desa digital dan konten kreatif. Dilihat dari aspek konten kreatif dalam pemasaran wisata secara digital sudah dilakukan Desa Wisata Cikakak melalui media sosial instagram dan *website* tetapi belum aktif secara berkala untuk memperbaharui informasi serta

mengunggah kegiatan yang terlaksana sebagai daya tarik wisata. Permasalahan yang masih dihadapi adalah belum konsistennya pengelola desa wisata melaksanakan promosi lewat jejaring sosial instagram serta *website*.

Tabel 1.4 Data Postingan Promosi Digital dengan Media Sosial Instagram

No.	Tahun	Jumlah Postingan
1.	2020	27 Postingan
2.	2021	65 Postingan
3.	2022	22 Postingan

Sumber: Media Sosial Instagram Desa Wisata Cikakak

Berdasarkan tabel 1.4, jumlah postingan yang dilakukan oleh pengelola Desa Wisata Cikakak pada tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun 2020, namun di tahun 2022 jumlah postingan sebagai salah satu wujud dari aspek konten kreatif dan desa digital mengalami penurunan dari 65 postingan menjadi hanya 22 postingan. Pengembangan *website* desa wisata juga masih terhambat karena terbatasnya sumber daya manusia yang mempunyai kapabilitas teknologi serta rendahnya kemauan untuk belajar. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Pokdarwis Saka Tunggal pada 21 April 2022, “Kendala digital pada rendahnya kemauan sumber daya manusia untuk belajar.”

Tabel 1.5 Data Pengunjung Desa Wisata Cikakak

No.	Tahun	Total Pengunjung	Omset
1.	2019	21.430 wisatawan	Rp 107.150.000
2.	2020	0	0
3.	2021	15.153 wisatawan	Rp 75.765.000
4.	2022	17.350 wisatawan	Rp 143.020.000

Sumber : Pokdarwis Saka Tunggal

Desa Cikakak diresmikan menjadi desa wisata pada tahun 2020. Bertepatan dengan waktu peresmiannya Desa Cikakak menutup seluruh lokawisata yang ada karena adanya kebijakan pembatasan sosial di tengah pandemi Covid-19. Bersumber tabel 1.5, meskipun di tahun 2021 Desa Wisata Cikakak mendapatkan beberapa penghargaan, namun jumlah pengunjung Desa Wisata Cikakak di tahun 2021 tidak mengalami peningkatan dari tahun 2019 dimana desa ini masih baru dirintis hingga menjadi desa wisata kategori maju. Meskipun di tahun 2022 jumlah wisatawan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021, tetapi masih lebih rendah di bandingkan tahun 2019.

Pariwisata berbasis masyarakat merupakan metode pemberdayaan yang membutuhkan keikutsertaan masyarakat menjadi pelaku. Pemberdayaan masyarakat diawali melalui penciptaan suasana maupun iklim yang membuat berkembangnya potensi masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Cikakak dilakukan melalui beberapa tahapan. Perencanaan melalui pelibatan partisipasi masyarakat secara aktif melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa yang bertujuan sebagai wadah menyampaikan aspirasi dan keinginan masyarakat terkait desa wisata ataupun program pelatihan atau pemberdayaan yang diinginkan, tetapi dalam pelaksanaannya musyawarah dusun dan musyawarah desa belum dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah desa dan musyawarah dusun masih rendah. Permasalahan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Pokdarwis Saka Tunggal pada wawancara 21 April 2022,

“SDM yang peduli dan mau berjuang mengembangkan desa wisata sangat jarang karena pengelola belum mampu mensejahterakan pelaku wisata sehingga untuk mewujudkan keberlanjutan program terhambat. Hal tersebut berdampak pada sulitnya menciptakan masyarakat yang mandiri.”

Pemberdayaan masyarakat pengelola Desa Wisata Cikakak juga dilakukan melalui pelatihan oleh beberapa pihak yaitu Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Banyumas; pemerintah desa, dan pendampingan dari akademisi. Permasalahan yang masih dihadapi pengelola Desa Wisata Cikakak adalah sumber daya manusia belum memiliki kompetensi dan *basic* pariwisata. Hal tersebut dapat dilihat dari belum adanya jasa pemandu wisata untuk setiap wisatawan yang datang. Meskipun, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Banyumas sebagai fasilitator berperan dalam meningkatkan kesadaran dan kompetensi masyarakat akan wisata yang sudah mulai dilaksanakan melalui pelatihan pemandu wisata, klaster wisata, dan pendampingan desa wisata. Namun, kemauan masyarakat untuk mengikuti pelatihan masih rendah. Berdasarkan penjelasan dari Sekretaris Pokdarwis Saka Tunggal pada tanggal 16 April 2022,

“Beberapa program pelatihan yang disediakan untuk pengelola masih mengalami kendala dalam pelaksanaannya karena peserta yang mengikuti pelatihan masih minim karena rendahnya jumlah peminat peserta yang mengikuti pelatihan secara berkelanjutan.”

Selain pelatihan, program pemberdayaan masyarakat desa wisata terwujud dengan pembentukan beberapa kelompok kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat.

Tabel 1.6 Kelompok Kerja Desa Wisata Cikakak

No.	Kelompok Kerja (Pokja)
1.	Pokja Saka Tunggal
2.	Pokja Embung Baron
3.	Pokja Wana Wisata
4.	Pokja Igir Pethek
5.	Pokja Religi dan Budaya Praja Laras
6.	Pokja Taman Kera
7.	Pokja Taman Edukasi

Sumber: BUMDes Mitra Usaha Sejahtera

Selain kelompok kerja dalam tabel 1.6, terdapat beberapa kelompok kerja lainnya yang terlibat seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kelompok Wanita Tani (KWT) Mugi Rahayu, serta UMKM penggerak Pasar Tradisional Antap. Untuk mengembangkan Desa Wisata Cikakak, pemerintah desa juga melakukan kerja sama dengan perhutani, LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) serta berusaha menggait investor.

Pasar Tradisional Antap yaitu pasar rakyat tradisional yang satu lokasi dengan Wisata Antap dan memiliki keunikan metode pembayaran tidak menggunakan uang tetapi koin yang sebelumnya dapat ditukar di loket yang tersedia. Pasar Tradisional Antap beroperasi setiap hari minggu pagi dan ditujukan sebagai wadah pemasaran UMKM. Kuliner khas yang ada di pasar ini adalah Ayam Gechok dan Wajik Kethek. Dibukanya Pasar Tradisional Antap memberikan manfaat kepada masyarakat Desa Cikakak karena adanya kesempatan dalam meningkatkan perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan. Meskipun demikian, terdapat permasalahan yang muncul dimana sarana dan prasarana mengalami kerusakan karena tidak terawat sehingga pada akhir 2022 Pasar Tradisional Antap ditutup sementara untuk dilakukan

evaluasi. Hal tersebut menyebabkan antusias pengunjung yang sudah datang merasa kecewa.

Gambar 1.2 Tempat Penukaran Koin Pasar Tradisional Antap



Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis

Pemberdayaan masyarakat juga dilakukan dengan pembentukan Pokja Aza Craft yang beranggotakan PKK dan KWT Mugi Rahayu melalui pengembangan ekonomi kreatif yaitu usaha kerajinan tangan dan hasil tani. Usaha kerajinan tangan pada mulanya sudah dikembangkan oleh Bapak Warso (warga setempat) dengan membuat *souvenir* dari kelapa kuring gabuk berupa kepala monyet yang menjadi penghasilan bagi masyarakat sekitar Masjid Saka Tunggal. Usaha kerajinan yang kedua ialah kerajinan plastik sebagai hiasan bunga serta kerajinan bambu menjadi bangku tradisional.

KWT Mugi Rahayu menjadi harapan bagi keluarga karena sumber dayanya berhasil diberdayakan dengan melaksanakan sejumlah aktivitas yakni Pelatihan Pembuatan Arang Sekam, Pelatihan Pembuatan Persemaian, dan Pelatihan Pemanfaatan Lahan Pekarangan. PKK juga diberdayakan melalui pendampingan pembukaan *homestay* serta pelatihan bagaimana manajemen

homestay. Pemberdayaan potensi wilayah Desa Cikakak juga dilakukan melalui pelestarian kearifan lokal yaitu produksi batik dengan motif khas Ngapak Cikakak sebagai *souvenir*.

Terdapat beberapa kesenian yang menjadi potensi budaya Desa Cikakak yaitu kesenian tari (Tari Jaro Rojab dan Tari Cikakak Ngrembaka); kesenian musik (Terbangan, Kentongan, Gamelan, Muludan atau Sholawatan Jawa); serta Festival Rewandha Bojana atau pemanggilan kera dimana kera turun guna memperoleh sajian yang terdapat di gunung buah dan menjadi *event* tahunan desa. Potensi budaya tersebut dikembangkan dengan memberdayakan masyarakat melalui pembentukan Pokja Kesenian Praja Laras. Meskipun demikian yang terlibat langsung dalam pelaksana kesenian masih didominasi oleh generasi terdahulu dimana generasi muda kurang antusias dalam partisipasi secara langsung dalam melestarikan budaya desa.

Permasalahan pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Cikakak yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program pelatihan yang ada secara berkelanjutan, kurangnya kesadaran dan keterlibatan generasi muda dalam melestarikan potensi budaya serta sudah mulai rusaknya sarana dan prasana lokawisata yang menjadi salah satu penyebab penutupan sementara Pasar Antap.

Pelayanan prima dapat menjadi fondasi desa wisata dapat bertahan. Pemberian pelayanan prima dapat diwujudkan dengan memberdayakan masyarakat pengelola desa wisata dengan terus berinovasi yang dapat menarik wisatawan.

1.2 Identifikasi Masalah

Menurut latar belakang masalah diatas sehingga identifikasi masalah dalam penelitian ialah:

1. Desa Wisata Cikakak menjadi satu-satunya desa wisata dengan kategori maju di Kabupaten Banyumas namun menurut klasifikasi Indeks Desa Membangun dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi masih di kategori desa berkembang karena tingginya jumlah penduduk miskin.
2. Masih rendahnya kesadaran dan pasrtisipasi masyarakat dalam memanfaatkan program pemberdayaan yang sudah direncanakan oleh pengelola pariwisata.
3. Kurangnya keterlibatan generasi muda dalam melestarikan potensi budaya wilayah.

1.3 Rumusan Masalah

Bersumber identifikasi permasalahan tersebut selanjutnya penulis tertarik untuk meneliti hal berikut :

1. Bagaimanakah pemberdayaaan masyarakat Desa Wisata Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas?
2. Apakah faktor pendorong dan faktor penghambat pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas?

1.4 Tujuan Penelitian

Bersumber uraian rumusan masalah diatas, selanjutnya tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas.
2. Mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikaji serta menjadi fokus pada penelitian sebagai tujuan yang ingin dicapai, harapannya penelitian ini bisa memberikan kebermanfaatan dalam pemecahan masalah baik secara teoritis dan juga praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis harapannya hasil penelitian bisa memperkaya teori dan pemahaman mengenai pemberdayaan masyarakat dalam konsep administrasi publik. Tidak hanya itu, hasil penelitian juga diharapkan bisa berguna menjadi rujukan untuk mengkaji serta menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata dan dapat menjadi kontribusi ilmiah bagi pembaca.

2. Kegunaan Praktis

Dalam pelaksanaannya, hasil penelitian ini harapannya bisa digunakan untuk menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi para pembuat program pemberdayaan masyarakat baik oleh pemerintah atau instansi terkait yang berfokus akan pemberdayaan masyarakat. Khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas; Dinas Pemuda, Olahraga, dan Kepariwisata Kabupaten Banyumas; Pemerintah Desa Cikakak; BUMDes Mitra Usaha Sejahtera dan Pokdarwis Saka Tunggal. Hasil penelitian diharapkan bisa bermanfaat dalam sumbangan pemikiran pengelolaan desa wisata agar lebih berdaya saing dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Untuk masyarakat hasil penelitian bisa dijadikan sumber informasi terkait pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Cikakak.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terlaksana tidak lepas dari hasil penelitian terdahulu yang sudah dijalankan dan digunakan menjadi materi perbandingan serta pembahasan. Selain itu, fungsi penelitian terdahulu untuk menghindari kesamaan dan menemukan kebaruan pada penelitian yang akan dilaksanakan. Hasil penelitian terdahulu yang digunakan sesuai dengan topik penelitian yang diangkat yaitu pemberdayaan masyarakat dalam desa wisata.

Tabel 1.7 Penelitian Terdahulu

No. (1)	Peneliti (2)	Judul (3)	Tujuan (4)	Metode (5)	Hasil Penelitian (6)
1.	(Wahyuni, 2018)	Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul	Untuk membahas rencana pemberdayaan masyarakat pada pengembangan Desa Wisata di Gunung Kidul	Deskriptif kualitatif	Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui tiga strategi yakni pendayaan, penyadaran, dan pengkapasitasan.
2.	(Prastiyo, 2019)	Analisis Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Cempaka Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal	Untuk memahami strategi pemberdayaan yang dilaksanakan masyarakat setempat guna mengoptimalkan potensi wilayahnya menjadi desa wisata	Deskriptif kualitatif	Desa Cempaka menerapkan delapan strategi pembangunan desa yaitu peningkatan kesadaran, studi banding, pemetaan potensi, pemberdayaan eksternal, pendidikan mandiri, paket wisata, pembangunan infrastruktur, dan strategi pemasaran. Tidak hanya itu, aktor serta perannya menjadi kunci kesuksesan penguatan masyarakat desa wisata Cempaka.
3.	(Admaja, Anggraini, & Suwarjo, 2020)	Desa Wisata Pentingsari; Upaya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Desa Wisata	Untuk memahami mekanisme pemberdayaan masyarakat untuk mengelola desa wisata ditinjau melalui aspek akses SDA, pengendalian, partisipasi, serta kemanfaatan	Deskriptif kualitatif	Pemberdayaan masyarakat untuk mengelola desa wisata Pentingsari digambarkan melalui empat faktor yakni akses, partisipasi, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berlangsung secara baik.

No.	Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	(Syaifudin & Ma'ruf, 2022)	Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata (Studi di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo)	Untuk menganalisis peran Pemerintah Desa Jurug pada pemberdayaan serta pembangunan masyarakat lewat program Desa Wisata Jurug	Deskriptif kualitatif	Andil pemerintah desa guna membangun dan memperkuat masyarakat dapat ditinjau dalam tiga peran yakni implementasi kebijakan, pelaksanaan program serta pelatihan. Peran Pemerintah Desa Jurug pada perumusan peraturan perihal pengembangan desa wisata sudah bagus, akan tetapi implementasi serta pelatihan programnya masih minim.
5.	(Soenarih, Alhumaira, S, & Saputra, 2021)	Strategi dan Aspek Keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Desa Wisata Kersik	Untuk memahami strategi pengembangan program pemberdayaan masyarakat pada pengelolaan Desa Wisata Kersik	Deskriptif kualitatif	Strategi pengembangan terdiri dari dua program pemberdayaan. Yang pertama adalah program budidaya mangrove yang sukses menyelesaikan erosi serta dikembangkan sebagai peluang wisata edukasi. Kedua, program mengelola sampah guna mendorong produksi cinderamata.
6.	(Irwan, Agustang, Adam, & Upe, 2021)	<i>Community Empowerment Strategy Towards a Sustainable</i>	Untuk menganalisis potensi Desa Bira menjadi desa wisata	Kualitatif	Model pemberdayaan masyarakat guna menunjang realisasi desa wisata berkelanjutan melalui

No.	Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<i>Rural Community-Based Tourism Village</i>	berkelanjutan menurut penerapan konsep pemberdayaan masyarakat		proses menganalisis konsep integrasi desa wisata, wisata masyarakat serta wisata berkelanjutan.
7.	(Purnomo, Rahayu, Riani, Suminah, & Udin, 2022)	<i>Empowerment Model for Sustainable Tourism Village in an Emerging Country</i>	Untuk memahami model pemberdayaan masyarakat pada pengembangan desa wisata berkelanjutan di Indonesia	Kualitatif	Ada empat pendekatan yang digunakan dalam pengembangan pariwisata Desa Ponggok yaitu pendekatan regional, industri, SDM serta pemanfaatan teknologi informasi. Kesuksesan pembangunan pariwisata terpengaruh atas kepemimpinan, kerjasama, inovasi serta manajemen yang baik.
8.	(Sasmitha & A.A.I.N., 2019)	<i>The Effect of Tourism Village Development on Community Empowerment and Welfare in Tourism Village of Panglipuran, Bangli District of Indonesia</i>	Untuk memahami dampak pengembangan desa wisata pada pemberdayaan masyarakat, dampak pengembangan desa wisata serta pemberdayaan masyarakat pada kesejahteraan masyarakat, peran pemberdayaan masyarakat untuk memediasi dampak	Kuantitatif	Pengembangan desa wisata berdampak positif dan signifikan pada pemberdayaan masyarakat. Berkembangnya desa wisata berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak memberikan dampak yang nyata pada kesejahteraan masyarakat, serta pengembangan desa wisata memberikan dampak tidak langsung kepada

No.	Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			pengembangan desa wisata pada kesejahteraan masyarakat, serta desain strategi pengembangan desa wisata berdasarkan kondisi masyarakatnya		masyarakat.
9.	(Hidayat, Rahmanita, & Hermantoro, 2017)	<i>Community Empowerment in Plempoh Cultural Tourism Village</i>	Untuk mengkaji pemberdayaan masyarakat melalui aspek politik, ekonomi, psikologis, dan sosial.	Deskriptif kualitatif	Pemberdayaan ekonomi sudah mencapai tahap keempat yaitu <i>support level</i> . Aspek psikologis pada tahap kedua yaitu penguatan. Aspek sosial pada tahap kelima yaitu pemeliharaan dan aspek politik pada level yang paling rendah yaitu kemungkinan.
10.	(Purbasari & Manaf, 2018)	<i>Comparative Study on the Characteristics of Community Based Tourism Between Pentingsari and Nglanggeran Tourism Village</i>	Untuk mengeksplorasi perbandingan karakteristik pariwisata berbasis masyarakat yang diterapkan di Pentingsari dan Nglanggeran	Kualitatif	Pentingsari memiliki karakteristik sebagai desa wisata berbasis masyarakat, sedangkan Nglanggeran memiliki karakteristik sebagai ekowisata berbasis masyarakat.

Setelah dicermati, penelitian terdahulu diatas memberikan sumbangan terhadap penelitian yang akan penulis lakukan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuni, 2018) yaitu teori pemberdayaan masyarakat melalui tiga tahapan yang mencakup penyadaran,

pengkapasitasan, dan pendayaan menurut Wrihatnolo dan Dwidjowiyoto. Sehingga, penelitian tersebut memberikan manfaat referensi terhadap penelitian ini. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Syaifudin & Ma'ruf, 2022) menjadi referensi dalam melihat fenomena faktor pendorong dan faktor penghambat pemberdayaan masyarakat. Perbedaan penelitian yang akan penulis laksanakan dengan riset terdahulu ialah pada lokus penelitian dimana belum ada penelitian lain yang membahas mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata di Desa Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Fokus dalam riset ini mengarah pada tiga tahapan pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Wrihatnolo dan Dwidjowiyoto serta faktor pendorong dan faktor penghambat pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas.

1.6.2 Administrasi Publik

Chandler dan Plano mengatakan administrasi publik merupakan pengelolaan sumber daya manusia serta individu pelayan publik dengan mengkoordinasikan untuk melakukan formulasi, implementasi dan pengelolaan putusan kebijakan publik. Pengertian Administrasi Publik berdasarkan catatan Keban menunjukkan cara pemerintah bertindak menjadi agen tunggal yang berperan dalam penyusunan regulasi secara proaktif untuk mengambil maupun mengatur tindakan serta inisiatif yang dianggap krusial, baik bagi sendiri sebagai badan pengatur dan masyarakat yang dianggap pasif, kurang mampu, penurut, dan menerima apapun diatur oleh pemerintah (Keban, 2014:3).

Paradigma dalam ilmu administrasi publik terjadi perubahan seiring waktu yang menyangkut tujuan, konsep teori, dan metodologi nilai-nilai yang mendasari. Nicholas Henry (dalam Keban, 2014:31) mengungkapkan lima paradigma administrasi publik berdasarkan fokus kepentingannya serta lokus administrasi tersebut dipraktekan dengan institusional yakni:

1. Dikotomi Politik-Administrasi (1900-1926)

Implikasi dari paradigma berikut adalah bahwasanya manajemen perlu dianggap tidak bernilai dan disesuaikan dengan produksi nilai ekonomi yang efisien melalui *government bureaucracy*. Sehingga, lokus yang ditekankan pada aspek *government bureaucracy*, tetapi fokusnya tidak dikaji dengan jelas serta terperinci.

2. Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)

Administrasi publik dipandang dapat berlaku secara universal di semua tatanan tanpa ada batasan budaya, fungsi, lingkungan, visi misi, atau struktur instansi. Prinsip-prinsip administrasi dalam menjadi fokus administrasi publik yang dikenal sebagai POSDCORB (*planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting*). Sementara lokusnya tidak dijelaskan dengan terang.

3. Administrasi Publik Sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Fase disuatu masa administrasi publik kembali dalam ilmu politik sebagai dasar untuk taat pada kekuasaan serta mempunyai wewenang penuh dalam melaksanakan pengabdian guna menunjang penguasa menjalankan pemerintahan dengan efisien dimana lokusnya adalah birokrasi

pemerintahan. Dalam hal ini fokus administrasi publik menjadi tidak jelas lantaran didalam pinsipnya terdapat sejumlah kelemahan.

4. Administrasi Publik Sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Model berikut berfokus pada perilaku organisasi, analisis manajemen, implementasi teknologi terkini misalnya metode kuantitatif, riset operasi, analisis sistem, dan lain-lain. Semua fokus yang diasumsikan dapat diterapkan tidak hanya dalam dunia bisnis tetapi juga dalam dunia administrasi publik. Oleh karena itu, lokusnya terlihat kabur.

5. Administrasi Publik Sebagai Administrasi Publik (1970-sekarang)

Lokus administrasi tidak terbatas pada administrasi namun telah masuk ke teori organisasi, manajerial serta kebijakan. Sementara fokusnya ialah pada isu-isu dan kepentingan publik.

Tidak hanya opini Nicholas Henry, ada pula opini dari George Frederickson (dalam Alamsyah, 2016:174) yang membagi administrasi publik ke dalam tiga fase perkembangan paradigma administrasi publik, sebagai berikut:

1. *New Public Administration* (NPA)

Frederickson menjelaskan pokok pikiran tentang NPA adalah keadilan sosial meliputi serangkaian pilihan nilai, kerangka organisasi, dan gaya manajemen, mengedepankan persamaan hak pada layanan pemerintah, menekankan akuntabilitas serta melaksanakan program manajer publik, mengedepankan perubahan pada manajemen publik, lebih memenuhi keperluan warga daripada keperluan lembaga publik, serta memastikan

pendekatan administrasi negara dan pendidikan administrasi negara yang bersifat indiscipliner, terapan, serta secara teoritis diterapkan pada pemecahan masalah.

2. *New Public Management* (NPM)

Memasuki dasawarsa 1980an muncul manajemen publik menjadi kajian penting pada administrasi publik. Manajemen publik ialah sistem perencanaan, sistem kontrol, sistem pengambilan keputusan, pemantauan serta banyak aspek lainnya. Selain itu, manajemen publik mengarah pada fleksibilitas, pemberdayaan, inovasi dan orientasi hasil, manajemen, dan anggaran berbasis kinerja. Dalam paradigma ini Osborne dan Gaebler (dalam Alamsyah, 2016:182) menyebutkan nilai-nilai usaha serta menerapkannya pada lingkungan birokrasi publik.

3. *New Public Service* (NPS)

Pandangan NPS menghendaki peran administrator publik untuk melibatkan masyarakat dalam pemerintahan dan bertugas untuk melayani masyarakat. Denhardt dan Denhardt (dalam Alamsyah, 2016: 192) menyampaikan beberapa prinsip NPS yakni melayani warga negara tidak hanya sebagai pelanggan yang ditinjau melalui kemampuan mereka untuk membayar maupun membeli produk serta layanan, mengedepankan kepentingan publik, keikutsertaan masyarakat lebih utama dibanding pemerintahan yang digerakan menurut motivasi wirausaha, sanggup berpikir strategis dan bertindak demokratis, akuntabilitas, melayani warga negara untuk mampu

mengungkapkan dan memenuhi kepentingannya, pemerintah melibatkan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan paradigma administrasi publik di atas, menunjukkan penelitian yang dilakukan tergolong pada paradigma *new public management*. Hal tersebut dikarenakan pada paradigma *new public management* berkaitan dengan pemberdayaan dan manajemen. Sehubungan dengan hal itu, riset berikut membahas pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Cikakak untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri melalui tahapan proses pemberdayaan.

1.6.3 Manajemen Publik

Manajemen publik termasuk pada ilmu Administrasi Publik dimana dalam arti sempit merupakan pengelolaan sektor publik. Pengembangan paradigma manajemen publik mengikuti perkembangan administrasi publik. Keragaman manajemen publik bisa dicermati dalam tiap pola administrasi publik yang disampaikan oleh Nicholas Henry. Dilihat dari pola pertama, pemerintah diikutsertakan pada pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia yang akuntabel. Sedangkan pada pola kedua, ditumbuhkan prinsip manajemen POSDCORB. Serta selanjutnya pola ketiga, fungsi dari manajemen publik dalam menjadi sistem yang universal.

Akhir 1980-an muncul transisi sektor publik dari wujud administrasi publik yang hierarkis, kaku, serta birokratis menjadi wujud administrasi publik berbasis pasar yang fleksibel. Pendekatan manajemen baru di sektor publik berikut memiliki sejumlah istilah misalnya manajerialisme,

manajemen publik baru, administrasi publik berbasis pasar, pemerintahan bisnis.

Menurut Owen. E Hughes (dalam Ansari, 2020:18) terdapat enam alasan hadirnya paradigma manajemen publik ialah sebagai berikut:

- a. Administrasi publik tradisional dinilai gagal dalam meraih tujuannya dengan efektif serta efisien, dengan demikian perlu diganti menjadi administrasi yang bertanggung jawab dan berorientasi kepada hasil (*performance oriented*).
- b. Ada tekanan kuat guna mengubah birokrasi klasik menjadi keadaan organisasi publik, kepegawaian, serta tugas yang lebih fleksibel.
- c. Mendefinisikan tujuan organisasi yang jelas serta instrumen pengukuran untuk implementasi yang berhasil melalui indikator kinerja.
- d. Perlunya pejabat senior memiliki komitmen politik terhadap pemerintah yang mempunyai kewenangan dibanding bersifat netral maupun tidak berpartisipasi.
- e. Fungsi-fungsi yang dilaksanakan pemerintahan semestinya perlu dicocokkan pada target serta signal pasar.
- f. Terdapat kecenderungan dalam mengurangi fungsi serta peran pemerintah melalui proses pelaksanaan kontrak kerja bersama pihak lain serta privatisasi.

Ghofur berpendapat manajemen publik atau manajemen pemerintahan merupakan suatu proses pemberian pelayanan kepada publik melalui perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan (Safitri, 2020:4). Overman (dalam Keban, 2014:92) berpendapat manajemen publik yaitu studi interdisipliner aspek umum organisasi dan kombinasi atas sejumlah fungsi manajemen misalnya perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian melalui penggunaan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik. Berdasarkan Mc Kevitt & Lawton (dalam Sudarmanto, 2020:2) mendefinisikan manajemen publik ialah studi interdisipliner tentang aspek organisasi, yakni integrasi fungsi perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian fungsi manajemen dengan pengelolaan SDM, keuangan, informasi fisik serta politik. Sementara Hughes (dalam Sudarmanto, 2020: 2) menegaskan bahwasanya manajemen publik bukan milik administrasi, namun mengikutsertakan organisasi dengan cara yang paling efektif untuk meraih tujuan dan tanggung jawab penuh untuk mendapatkan hasilnya.

Berdasarkan sejumlah penuturan ahli di atas bisa disimpulkan bahwasanya manajemen publik ialah sekumpulan mekanisme mulai dari perencanaan, pengelolaan, pengorganisasian, hingga pengontrolan dalam organisasi melalui pemanfaatan berbagai sumber daya yang tersedia guna meraih tujuan yang telah ditentukan dan mendapatkan hasil yang maksimal.

1.6.4 Pemberdayaan Masyarakat

Administrasi publik sebagai *the work of government* mempunyai fungsi yang krusial pada sebuah negara terutama di layanan publik, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Frederick A. Cleveland (dalam Keban, 2014:15-16) menyatakan bahwasanya administrasi publik begitu penting untuk pemberdayaan masyarakat serta membangun demokrasi. Peran administrasi publik perlu dilaksanakan dengan efektif lewat inovasi, prinsip tata pemerintahan yang baik, penggunaan teknologi, penguatan lembaga publik, partisipasi, peningkatan kapasitas, desentralisasi, penyampaian layanan, pemberdayaan serta kemitraan di sektor publik serta swasta.

Keterkaitan manajemen dengan pemberdayaan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pemberdayaan masyarakat tidak bisa terlaksana secara benar apabila tidak dikelola melalui proses perencanaan yang partisipatif dan melibatkan semua elemen masyarakat. Manajemen merupakan tata kelola kegiatan dari awal hingga akhir yang menjadi dasar dari setiap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang pengaruhnya sangat besar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tidak terlepas dari manajemen yang baik.

Berdasarkan etimologi pemberdayaan bersumber melalui kata “daya” yang berarti kekuatan. Singkatnya, pemberdayaan berarti memberdayakan kelompok yang lemah serta belum memiliki kemampuan dalam hidup mandiri, khususnya untuk mencukupi kebutuhan primer maupun pokok seperti sandang,

pangan, serta papan. Pemberdayaan yang disampaikan oleh Ifa (dalam Juniarto & Laksmono, 2021:119) memiliki arti meningkatkan keberdayaan kelompok kurang mampu berdasarkan golongan, ras, jenis kelamin, lanjut usia, anak-anak serta remaja, difabel dan terkucilkan, serta masyarakat yang terjadi kedukaan serta kesedihan lantaran kehilangan individu yang dicintai maupun yang mempunyai masalah pribadi dan keluarga.

Mardikanto dan Soebiato berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan usaha dalam mengangkat harkat serta martabat kelompok masyarakat yang saat ini tidak sanggup keluar pada jerat kemiskinan serta keterbelakangan (Mardikanto, 2017:40). Pemberdayaan sebagai suatu proses berarti kapabiitas dalam ikut serta, menangkap peluang serta mengakses sumber daya serta layanan yang diperlukan guna meningkatkan mutu hidup, baik bagi individu maupun kelompok serta publik pada umumnya. Berdasarkan pendapat Suparjan (dalam Prastiyo, 2019: 6) konsep dasar pemberdayaan ialah menyediakan peluang seluas-luasnya kepada khalayak guna memilih arah hidupnya sendiri di masyarakat.

Gunawan (dalam Hamid, 2018:10) mendefinisikan pemberdayaan publik ialah kegiatan sosial yang mana warga masyarakat mengorganisir untuk merencanakan serta tindakan kolektif guna menyelesaikan permasalahan sosial ataupun mencukupi keperluan sosial berdasarkan kapabilitas serta sumber daya mereka. Sedangkan, Robert Chambers (dalam Hamid, 2018:10) berpendapat bahwasanya pemberdayaan masyarakat ialah suatu konsep

pembangunan perekonomian yang mencakup nilai sosial yang sifatnya *participatory, people centered, sustainable* dan *empowering*,.

Pemberdayaan mengacu terhadap kapabilitas orang ataupun sekelompok yang lemah dan rentan guna menentukan kapabilitas dan kekuatan:

1. Mencukupi keperluan dasar mereka hingga mereka mempunyai kebebasan pada artian tidak hanya berbicara pikiran mereka tetapi juga terbebas dari kebodohan, kelaparan, serta rasa sakit.
2. Akses sumber produksi yang memungkinkan mereka guna mengoptimalkan pendapatan mereka serta mendapatkan produk ataupun layanan yang dibutuhkan.
3. Berkontribusi pada upaya pengembangan serta keputusan yang mempengaruhinya (Suharto, 2014:57).

Keadaan ketidakberdayaan masyarakat bisa diakibatkan oleh beragam aspek. Anne Both dan Firdausy (dalam Mulyawan, 2016:55-56) memaparkan bahwasanya sebab ketidakberdayaan masyarakat dalam menghadapi kemiskinan ialah terbatasnya akses masyarakat terhadap pasar produk, pelayanan publik, serta perkreditan. Keterbatasan ini disampaikan oleh Both dipengaruhi oleh empat faktor yaitu sosial kebudayaan, ekonomi, lingkungan dan geografis dan fisik personal.

Pemberdayaan masyarakat ialah aktivitas yang mempunyai tujuan jelas serta perlu diwujudkan. Sehingga, penerapannya membutuhkan upaya strategi

tertentu guna mewujudkan keberhasilan yang diharapkan. Strategi didefinisikan menjadi tahapan khusus ataupun sikap yang diambil guna mencapai tujuan. Aktivitas pemberdayaan masyarakat harus didasarkan pada upaya khusus guna mewujudkan tujuan yang diharapkan.

Strategi pemberdayaan masyarakat menurut (Mardikanto, 2017:168-169) memiliki 3 arah, yakni keberpihakan serta pemberdayaan masyarakat, pematapan otonomi serta delegasi kewenangan pada pengelolaan pembangunan yang mendorong partisipasi publik, serta modernisasi dengan mempertajam arah perubahan struktur ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, serta politik yang bersumber dari masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bisa berjalan melalui strategi berikut:

1. Menyusun instrumen pengumpulan data mencakup hasil penelitian yang telah dilakukan, referensi yang tersedia, dan menggunakan hasil temuan dari observasi lapangan.
2. Pembangunan pemahaman dan komitmen guna menunjang kemandirian individu, keluarga serta masyarakat.
3. Penyusunan sistem informasi, pengembangan sistem analisis, intervensi, monitoring serta penilaian pemberdayaan individu, keluarga serta masyarakat.

Pelaksanaan mekanisme dan pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Suharto (Mardikanto, 2017:171-172) bisa diwujudkan dari implementasi strategi pemberdayaan 5P yang terdiri dari Pemungkinan,

Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan yang dipaparkan sebagai berikut:

1. Pemungkinan

Menciptakan kondisi ataupun iklim maka potensi masyarakat dapat bertumbuh kembang secara optimal. Pemberdayaan harusnya bisa membebaskan masyarakat dari hambatan struktural dan kultural yang merintanginya.

2. Penguatan

Menguatkan pemahaman serta keterampilan masyarakat guna menyelesaikan permasalahan serta mencukupi kebutuhan. Pemberdayaan harusnya mengembangkan semua keterampilan serta kepercayaan diri masyarakat yang mendukung kemandirian.

3. Perlindungan

Menjaga masyarakat, khususnya kelompok rentan dari penindasan golongan kuat, menjauhi persaingan yang tidak sehat terutama tidak seimbang antara yang lemah dan kuat, serta meminimalisir eksploitasi golongan lemah dan kuat. Pemberdayaan harusnya bertujuan guna menghilangkan beragam bentuk dominasi dan diskriminasi yang dapat menjadikan khalayak kecil diuntungkan.

4. Penyokongan

Memberi dukungan dan bimbingan sehingga masyarakat mampu memenuhi peran serta tanggung jawabnya dalam kehidupan.

Pemberdayaan harusnya bisa menyokong masyarakat supaya tidak berada dalam keadaan yang semakin rentan serta terpinggirkan.

5. Pemeliharaan

Memelihara keadaan yang kondusif agar tidak terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harusnya dapat memberi jaminan keseimbangan dan keselarasan yang memberikan kesempatan pada tiap individu agar memperoleh kesempatan berusaha.

Menurut Suhartini (dalam Anugrawati, 2021:136) model pemberdayaan bisa dijalankan secara mandiri oleh masyarakat melalui:

1. Membantu masyarakat menemukan permasalahannya.
2. Menjalankan analisis mandiri pada isu-isu yang berdampak langsung pada publik melalui cara berbagi persepsi, membuat kelompok diskusi serta membuat pertemuan publik secara rutin dan berkelanjutan.
3. Menentukan skala prioritas permasalahan yang akan dipecahkan.
4. Mencari cara penyelesaian permasalahan yang hendak dihadapi melalui pendekatan sosial budaya yang ada dalam masyarakat.
5. Melaksanakan tindakan nyata guna memecahkan permasalahan yang ditemukan.
6. Mengevaluasi semua mekanisme pemberdayaan guna menilai kegagalan dan keberhasilannya

Sumodiningrat (dalam Mardikanto, 2017:29) mengatakan bahwasanya pemberdayaan ialah usaha guna menciptakan peluang dan atau memfasilitasi

kelompok miskin pada sumber daya berupa teknologi, modal, jaminan pemasaran, informasi, dll. Tujuannya ialah untuk memajukan dan mengembangkan usaha sehingga dapat memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan kesempatan guna kesejahteraan. Upaya penguatan pemberdayaan masyarakat bisa dicermati dalam 3 bahasan berikutnya:

1. Menciptakan kondisi ataupun iklim yang menjadikan berkembangnya potensi masyarakat (*enebling*). Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwasanya tiap individu mempunyai potensinya masing-masing yang bisa mereka kembangkan. Sehingga, pemberdayaan ialah usaha guna memotivasi, menumbuhkan rasa sadar akan potensi diri serta berusaha untuk mengembangkannya.
2. Menguatkan potensi ataupun daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowerment*). Langkah ini ialah tindak lanjut dari pembentukan kondisi dan iklim untuk berkembang. Strategi ini dilaksanakan melalui penyediaan berbagai masukan serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Upaya yang dilakukan ialah membangun fasilitas pokok guna mengoptimalkan layanan pada beragam sumber pembangunan perekonomian berupa teknologi, modal, lapangan kerja, pengetahuan, serta pasar.
3. Memberdayakan juga berarti melindungi. Pada aktivitas pemberdayaan, diharuskan adanya upaya pencegahan yang lemah menjadi bertambah lemah karena kurang berdaya menghadapi yang kuat. Sehingga, pada

konsep pemberdayaan, perlindungan dan pemihakan kepada kelompok rentan ialah hal yang fundamental.

Pemberdayaan adalah proses memberikan kemudahan atau membuka akses dengan tujuan kemajuan dan kemandirian yang berfokus terhadap publik dengan mengedepankan asas partisipasi, jejaring, keadilan, dan kemandirian. Pemberdayaan masyarakat mencakup *community development* dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Memberdayakan masyarakat adalah upata untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat miskin yang masih terjat dalam perangkap kemiskinan dan keterbelakangan (Wulpiah, 2019:30). Sehingga, pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk memerangi kemiskinan dengan menjadikan masyarakat mampu berdikari dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.

Pemberdayaan masyarakat ialah usaha guna menciptakan ataupun mengoptimalkan kemampuan masyarakat baik secara individual ataupun kelompok, guna menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian. Pemberdayaan masyarakat membutuhkan keterlibatan yang besar dari aparaturn daerah dan berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. Permendagri Nomor 71 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat memaparkan bahwasanya pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk menunjukkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemberdayaan dapat

didefinisikan sebagai penambahan keterampilan pada orang-orang yang lemah. Tidak hanya pada kemampuan ekonomi, tetapi juga dalam keterampilan lain yang dapat memberdayakan pihak lain berdaya, seperti budaya, politik, kemasyarakatan, agama, dan lainnya.

Pemberdayaan ialah “proses menjadi” bukanlah “proses instan” yang kegiatannya disadari sepenuhnya oleh seluruh pihak yang terkait. Memberdayakan masyarakat membutuhkan proses yang bertahap sehingga dapat meningkatkan skala dari utilitas obyek yang diberdayakan. Wilson (dalam Mardikanto, 2017:122) memaparkan bahwasanya pemberdayaan dalam tiap orang pada sebuah lembaga ialah siklus aktivitas yang tersusun atas sejumlah hal diantaranya:

Gambar 1.3 Siklus Pemberdayaan Masyarakat



Sumber: Wilson (dalam Mardikanto & Soebiato, 2017:123)

1. Menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki yang merupakan titik awal perlunya pemberdayaan.

2. Menumbuhkan kemauan guna dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan dan atau kendala yang dirasakan dan selanjutnya mengambil keputusan untuk menjalankan pemberdayaan serta melaksanakan perbaikan dan perubahan yang diharapkan.
3. Mengembangkan keinginan guna berpartisipasi pada aktivitas pemberdayaan masyarakat yang membawa kebermanfaatan ataupun memperbaiki kondisi.
4. Meningkatnya peranan ataupun kontribusi pada aktivitas pemberdayaan yang membawa kebermanfaatan ataupun perbaikan.
5. Meningkatnya peranan serta loyalitas terhadap pemberdayaan yang tercermin dari berkembangnya motivasi guna perbaikan.
6. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat.
7. Meningkatkan kemampuan guna membawa perbaikan melalui aktivitas pemberdayaan baru.

Tahapan dalam pemberdayaan masyarakat menurut Wrihatnolo dan Dwidjowiyoto (dalam Wahyuni, 2018:87) yaitu:

1. Tahap Penyadaran

Tahap ini subjek dari pemberdayaan yaitu masyarakat diberi pengertian bahwasanya mereka memiliki potensi dan hak agar bisa mengembangkan potensinya. Di lain sisi, masyarakat diberi motivasi bahwasanya mereka harus mampu mengembangkan potensi yang dimiliki dimulai dari diri sendiri. Aktivitas ini dapat dipercepat dan

dirasionalkan hasilnya dengan adanya usaha pendampingan atau fasilitator guna mencapai kemandirian. Sehingga, masyarakat mampu menciptakan iklim yang memungkinkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki.

2. Tahap Pengkapasitasan

Tujuannya guna memampukan masyarakat baik individu maupun kelompok sehingga mereka mempunyai keterampilan untuk mengelola peluang yang akan diberikan. Tahapan pengkapasitasan dijalankan melalui upaya pemberian lokakarya, pelatihan, serta aktivitas serupa yang tujuannya guna mengoptimalkan *life skill* masyarakat.

3. Tahap Pendayaan

Masyarakat diberikan peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang ditempuh dengan memberikan peran yang lebih besar secara bertahap sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya serta diakomodasi aspirasinya serta dituntun untuk melakukan *self evaluation* terhadap pilihan dan hasil pelaksanaan atas pilihan tersebut.

Berdasarkan Tim Delivery (dalam Mardikanto, 2017:125) tahapan pemberdayaan masyarakat diawali dari proses seleksi serta tiga tahapan yang lain. Secara rinci, tahapan pemberdayaan masyarakat tersebut diantaranya:

1. Tahap 1. Seleksi Lokasi

Tahapan ini dijalankan berdasarkan kriteria yang disepakati oleh instansi, pihak terkait, serta masyarakat.

2. Tahap 2. Sosialisasi Pemberdayaan Publik

Sosialisasi dijalankan dengan mengkomunikasikan aktivitas sebagai proses berdialog bersama masyarakat. Tujuannya ialah guna mewujudkan pemahaman yang selaras diantara masyarakat dengan pihak yang berkaitan tentang aktivitas pemberdayaan masyarakat yang sudah dirancang.

3. Tahap 3. Proses Pemberdayaan Publik

Tahapan ini mencakup beberapa proses yaitu identifikasi potensi wilayah, permasalahan, dan peluangnya; pengembangan kelompok; menyusun rencana, serta implementasi program; serta yang terakhir adalah pemantauan dan evaluasi partisipasi.

4. Tahap 4. Pemandirian Masyarakat

Tujuan pemandirian masyarakat ialah pendampingan guna mempersiapkan masyarakat agar sungguh-sungguh mampu mengelola sendiri programnya.

Pada penelitian ini penulis hendak melihat tahapan pemberdayaan masyarakat yang diungkapkan Wrihatnolo dan Dwidjowiyoto. Berdasarkan pendapat dari Wrihatnolo dan Dwidjowiyoto tahapan pemberdayaan masyarakat mencakup 3 tahap yakni tahapan penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pendayaan. Hal tersebut sejalan dengan pengelolaan Desa Wisata Cikakak yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung pada pariwisata dengan tujuan menciptakan kemandirian masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat berdasarkan pendapat Sumaryadi (dalam Wicaksono, 2020:6) yakni meliputi:

1. Kemauan publik guna menerima pemberdayaan tergantung terhadap kondisi yang mereka hadapi.
2. Pemikiran bahwasanya pemberdayaan bukan bagi seluruh individu serta perspektif tokoh masyarakat bahwasanya pemberdayaan dapat mengorbankan diri mereka sendiri.
3. Ketergantungan budaya di mana masyarakat sudah terbiasa terhadap birokrasi, hierarki, serta kontrol manajerial yang ketat hingga pola pikir mereka terpaku pada rutinitas.
4. Dorongan dari para pemimpin kelompok untuk tidak mau melepaskan kekuasaannya karena inti dari pemberdayaan adalah pelepasan sebagian kewenangan untuk diserahkan kepada masyarakat sendiri.
5. Adanya batasan keberdayaan khususnya perihal siklus pemberdayaan yang berlangsung lama, yang mana di satu sisi kapabilitas serta motivasi tiap individu berbeda-beda.
6. Adanya kepercayaan dari pada pemimpin komunitas untuk mengembangkan pemberdayaan dan mengubah persepsi mereka tentang anggota komunitasnya.
7. Pemberdayaan tidak kondusif bagi perubahan yang cepat.
8. Pemberdayaan membutuhkan dukungan sumber daya yang besar baik dari segi pembiayaan maupun waktu.

Menurut Ibrahim (dalam Haqqie, 2016:27) terdapat faktor mendasar kendala pada pemberdayaan diantaranya:

1. Kurangnya perencanaan ataupun estimasi dalam proses difusi inovasi.
2. Adanya konflik yang muncul akibat permasalahan pribadi, berupa ketidaksepakatan antara anggota kelompok.
3. Kurangnya motivasi kerja serta perilaku pribadi yang berbeda mempengaruhi lancar tidaknya mekanisme inovasi
4. Inovasi tidak muncul
5. Permasalahan keuangan
6. Menolak suatu golongan serta kurangnya korelasi sosial

Berdasarkan pendapat Almasri dan Deswimar (dalam Haqqie, 2016:28) mengemukakan hambatan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Modal kecil
2. Penguasaan teknologi rendah
3. Peluang serta kesempatan kerja yang buruk
4. Keterbatasan pengembangan sumber daya manusia serta tidak dikuasainya akses pasar

Arsyiah (dalam Haqqie, 2016:27) memaparkan bahwasanya terdapat sejumlah faktor penghambat pada implementasi pemberdayaan masyarakat yakni:

1. Sumber daya manusia yang terbatas
2. Kekurangan bahan baku

3. Tidak adanya kemampuan mengelola peluang pasar dan terbatasnya modal usaha yang dimiliki
4. Akses pemerintah dengan swasta belum maksimal
5. Tidak ada sektor swasta yang memberikan bantuan modal sebagai usaha pemberdayaan masyarakat

Faktor penghambat pemberdayaan masyarakat menurut Margayaningsih (2018:81) yaitu sebagai berikut:

1. Anggaran
2. Sarana dan Prasarana

Menurut Margayaningsih (2018:80) faktor pendorong dalam memberdayakan masyarakat diantaranya:

1. Motivasi
2. Kebijaksanaan pemerintah

Mardikanto (2013:188) mengatakan ada sejumlah faktor pendorong pemberdayaan masyarakat yakni:

1. Sumber daya alam
2. Sumber daya manusia
3. Keadaan kelembagaan
4. Sarana dan prasarana
5. Kebijakan
6. Organisasi dan administrasi pemberdayaan masyarakat

Mekanisme pemberdayaan masyarakat dipengaruhi beberapa faktor penghambat serta faktor pendorong dalam mencapai keberhasilannya. Fenomena faktor penghambat dalam penelitian ini akan dipahami berdasarkan pendapat Almasri dan Deswimar yaitu keterbatasan kemampuan mengelola peluang pasar yang ada dan terbatasnya modal usaha yang dimiliki serta pendapat Arsyiah yakni sumber daya manusia. Kemudian, fenomena faktor pendorong dalam penelitian ini dilihat dari pendapat Mardikanto yaitu sumber daya alam, kebijakan, dan organisasi.

Sumodiningrat (dalam Wulandari, 2022:317) indikator keberhasilan yang digunakan dalam mengukur pelaksanaan pemberdayaan masyarakat diantaranya sebagai berikut :

1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin.
2. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat pada upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
4. Tumbuhnya kemandirian kelompok tercermin dari semakin berkembangnya usaha produktif, menguatnya modal kelompok, terselenggaranya sistem administrasi kelompok yang rapi dan interaksi sosial yang semakin luas dengan kelompok lain.
5. Tingginya kapabilitas publik serta pemerataan penghasilan yang tercermin dari semakin tingginya penghasilan keluarga miskin yang mampu mencukupi keperluan dasar serta kebutuhan sosial dasarnya.

Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato menyampaikan indikator keberhasilan yang dapat digunakan untuk mengukur pelaksanaan pemberdayaan masyarakat (Mardikanto, 2017:291-292)

1. Banyaknya penduduk yang benar-benar tertarik untuk mengikuti setiap aktivitas yang dijalankan.
2. Frekuensi partisipasi tiap penduduk dalam berbagai jenis kegiatan.
3. Tingkat kemudahan penyelenggara program untuk memperoleh pertimbangan atau persetujuan warga atas ide baru yang dikemukakan.
4. Jumlah dan jenis ide yang dikemukakan oleh masyarakat yang ditujukan untuk kelancaran pelaksanaan program pengendalian.
5. Jumlah dana yang dapat digali dari masyarakat untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan.
6. Intensitas kegiatan petugas dalam pengendalian masalah

1.6.5 Desa Wisata

Berdasarkan Wiendu Nuryanti (dalam Sugiarti, 2016:17) desa wisata ialah wujud integrasi atraksi, akomodasi, serta layanan pendukung, yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Chafid Fadeli (dalam Rindi, 2019:20) mengungkapkan bahwasanya desa wisata ialah wilayah pedesaan yang menyuguhkan kondisi yang mencerminkan keaslian desa melalui segi kehidupan sosial kebudayaan, kegiatan sehari-hari, adat istiadat, struktur desa, arsitektur bangunan, serta aspek-aspek guna dikembangkan menjadi wisata. Berdasarkan Permendikbud Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata, desa wisata ialah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

Tujuan pengembangan desa wisata:

1. Masyarakat menyadari adanya kesempatan serta kemauan guna memanfaatkan yang dapat diperoleh melalui aktivitas pariwisata untuk mengoptimalkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
2. Meningkatkan status serta peranan masyarakat selaku subjek ataupun pelaku terpenting pada pembangunan pariwisata dan kemampuan guna menciptakan sinergi dan bermitra bersama *stakeholder* terkait pengoptimalan mutu pembangunan pariwisata di daerah.
3. Membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat dan memperkenalkan, melestarikan, dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di masing-masing daerah.
4. Sebagai wadah langsung bagi masyarakat akan kesadaran adanya potensi wisata dan terciptanya Sapta Pesona di lingkungan wilayah destinasi wisata dan sebagai unsur kemitraan baik bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

5. Peningkatan penjualan produk lokal, dapat memberikan kemudahan akses untuk warga melakukan penjualan ke luar daerahnya atau bahkan ke luar negeri sekalipun. Hal ini juga perlu didukung dengan branding yang kuat dari desa serta sumber daya manusia yang mampu untuk manajemen penjualan (Ni'mah, 2019:48-49).

Selain itu menurut (Edwin, 2015:156) desa yang bisa dikembangkan dalam program desa wisata harus memenuhi beberapa persyaratan yang diuraikan sebagai berikut :

1. Aksesibilitas baik yang dapat mempermudah wisatawan menuju lokasi menggunakan berbagai jenis transportasi baik publik maupun pribadi.
2. Memiliki objek menarik yang mencakup alam, seni budaya, legenda, makanan lokal yang dikembangkan menjadi obyek wisata.
3. Masyarakat dan aparat desa menerima dan mendukung terhadap perkembangan desa wisata serta menyambut baik wisatawan yang datang.
4. Keamanan dapat terjamin.
5. Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai.
6. Beriklim sejuk.
7. Berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas.

Prinsip pengembangan desa wisata menurut Sastrayuda (dalam Aliyah, 2020:21) adalah sebagai salah satu produk wisata pilihan yang bisa menunjang

pembangunan desa secara berkelanjutan dan mempunyai prinsip manajemen sebagai berikut:

1. Menggunakan fasilitas publik terkait
2. Bermanfaat bagi khalayak setempat
3. Berskala kecil untuk memudahkan terjalinnya hubungan timbal balik terhadap masyarakat setempat
4. Mengikutsertakan masyarakat setempat
5. Pelaksanaan pengembangan produk desa wisata

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional terdapat empat pilar pembangunan pariwisata yaitu sebagai berikut :

Gambar 1.4 Pilar Pembangunan Pariwisata

DESTINASI PARIWISATA	PEMASARAN PARIWISATA	INDUSTRI PARIWISATA	KELEMBAGAAN PARIWISATA
a. Perwilayahan Pembangunan DPN;	a. Pengembangan pasar wisatawan;	a. Penguatan struktur Industri Pariwisata;	a. Penguatan Organisasi Kepariwisata;
b. Pembangunan Daya Tarik Wisata;	b. Pengembangan citra pariwisata;	b. Peningkatan daya saing produk pariwisata;	b. Pembangunan SDM Pariwisata; dan
c. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;	c. Pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan	c. Pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;	c. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan
d. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;	d. Pengembangan promosi pariwisata	d. Penciptaan kredibilitas bisnis; dan	
e. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata; dan		e. Pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan	
f. Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata			

Sumber: PP RI Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (dalam Aliyah, 2020:33)

Dari gambar diatas dapat dipahami bahwasanya pada pengembangan destinasi wisata harus ada sarana dan prasarana untuk mendukung aktivitas pengunjung destinasi wisata. Tolak ukur pengembangan pariwisata berbasis masyarakat ialah terwujudnya hubungan yang harmonis antara masyarakat setempat, sumber daya alam dan budaya serta wisatawan, yang tercermin dalam poin-poin berikut:

1. Adanya peningkatan antusiasme pembangunan masyarakat melalui pembentukan suatu wadah organisasi untuk menampung segala aspirasi masyarakat melalui sistem kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat lokal.
2. Adanya keberlanjutan lingkungan fisik yang ada di masyarakat melalui konservasi, promosi, dan menciptakan tujuan hidup yang harmonis antara sumber daya alam, sumber daya budaya, dan sumber daya manusia.
3. Adanya keberlanjutan ekonomi melalui pemerataan dan keadilan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.
4. Membangun sistem yang menguntungkan masyarakat seperti sistem informasi yang dapat digunakan bersama.
5. Menjaga kepuasan wisatawan melalui pelayanan yang lebih baik, pengadaan informasi yang efektif, efisien, tepat guna, serta mengutamakan kenyamanan bagi wisatawan.

Terbentuknya desa wisata bukan berarti merubah bentuk dan tatanan yang sudah ada dari wilayah desa tetapi menggali potensi yang ada melalui

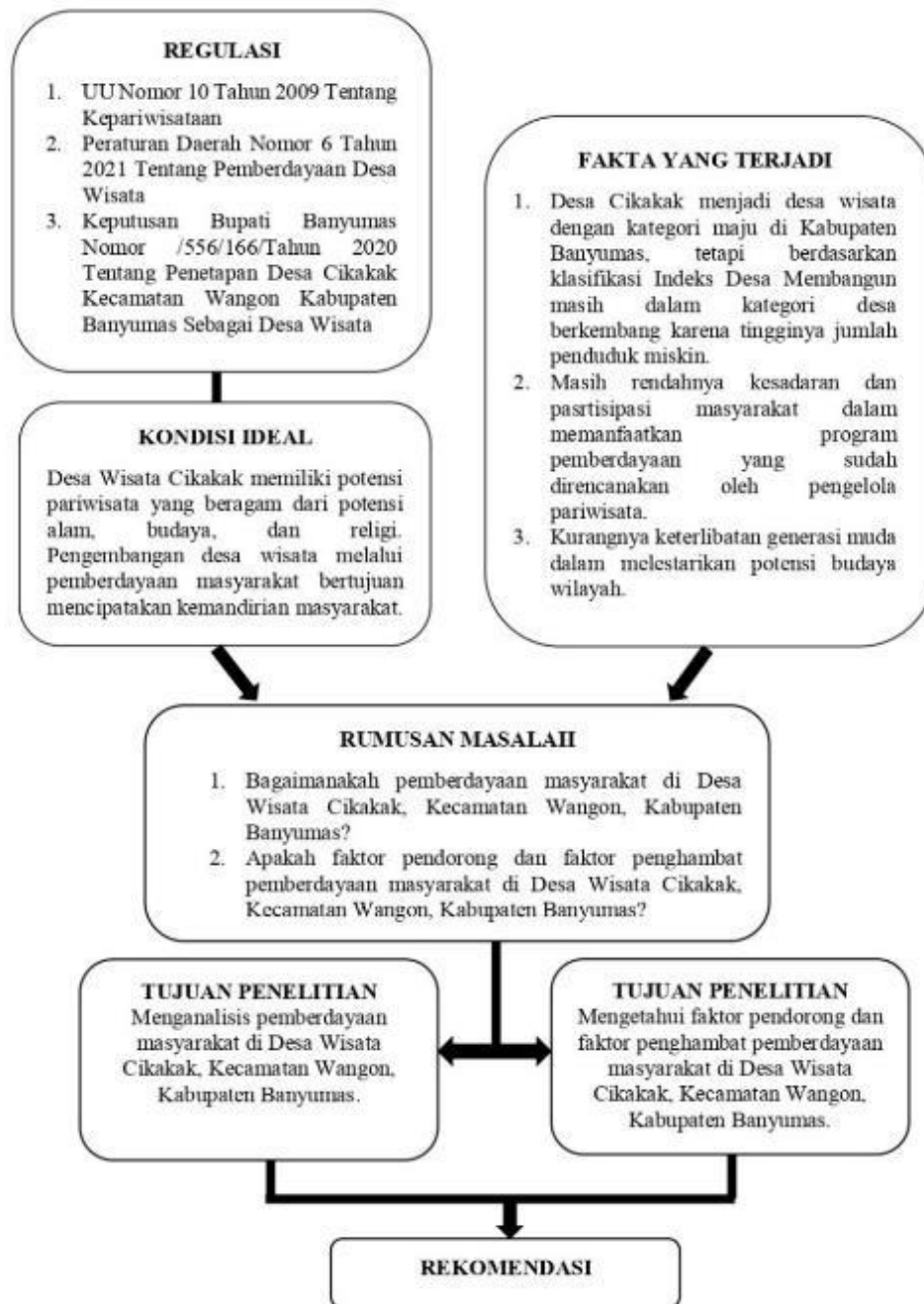
pemanfaatan kemampuan penduduk desa yang berfungsi sebagai atribut produk wisata dalam skala kecil menjadi rangkaian aktivitas pariwisata serta mampu menyediakan dan memenuhi kebutuhan pariwisata baik dari aspek daya tarik dan sarana prasarana pendukung.

Desa wisata dibentuk untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berperan sebagai pelaku dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian dalam menyikapi potensi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata di wilayah mereka agar dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik bagi para wisatawan yang berkunjung. Terdapat tiga cara dalam pengembangan pariwisata kerakyatan yaitu swadaya atau sepenuhnya dari masyarakat, kemitraan (melalui pengusaha besar/kecil), dan pendampingan oleh LSM atau perguruan tinggi selama masyarakat dianggap belum mampu untuk mandiri (Aliyah, 2020:20).

1.6.5 Kerangka Pikir

Bersumber latar belakang serta teori yang sudah dijabarkan diatas maka kerangka pikir dalam penelitian digambarkan dalam skema gambar konsep berikut:

Gambar 1.5 Kerangka Pikir



Sumber : Diolah oleh Penulis (2022)

1.7 Operasionalisasi Konsep

Untuk mendapatkan batasan secara jelas, maka penulis menyederhanakan pemikiran atas permasalahan yang akan penulis teliti dengan operasionalisasi konsep sebagai berikut:

Pemberdayaan masyarakat adalah pembangunan ekonomi yang difokuskan terhadap seluruh masyarakat dengan sifat *people centered*, *participatory*, *empowerment* dan *sustainable*. Tujuannya yaitu memandirikan dan memampukan masyarakat khususnya dari keterbelakangan, kemiskinan, ketidakberdayaan, dan kesenjangan.

Operasionalisasi konsep pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, meliputi:

1. Tahap penyadaran yaitu masyarakat Desa Wisata Cikakak sebagai subjek pemberdayaan diberi penyadaran potensi yang dapat dikembangkan. Indikatornya yaitu:
 - 1) Sosialisasi berkaitan program Desa Wisata Cikakak
 - 2) Respon masyarakat terhadap program Desa Wisata Cikakak
 - 3) Pelibatan masyarakat dalam program Desa Wisata Cikakak
2. Tahap pengkapasitasan yaitu tahapan memberikan kapasitas keterampilan serta pelatihan sehingga penduduk Desa Cikakak semakin mampu menjalankan potensi yang dimiliki. Indikatornya yaitu:
 - 1) Proses pemberian daya melalui pelatihan dan pendampingan

3. Tahapan pendayaan yakni memberi daya dan peluang kepada masyarakat Desa Wisata Cikakak sesuai dengan kualitas dan kecakapan yang dimiliki oleh masyarakat. Indikatornya yaitu:
 - 1) Kecakapan masyarakat dalam Desa Wisata Cikakak
 - 2) Bantuan modal Desa Wisata Cikakak

Untuk mencapai keberhasilan pemberdayaan masyarakat terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat yang mempengaruhi prosesnya. Faktor pendorong adalah keadaan yang menunjang usaha, aktivitas ataupun produksi. Sedangkan, faktor penghambat ialah keadaan yang bisa melemahkan ataupun menghalangi usaha, aktivitas, ataupun produksi.

Faktor pendorong dan faktor penghambat pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Cikakak yaitu:

1. Sumber daya alam, dapat ditentukan berdasarkan potensi yang dimiliki serta manajemen dalam pengembangan potensi sumber daya alam.
2. Kebijakan, dapat ditentukan dari kebijakan yang diberikan pemerintah dalam mendukung pemberdayaan masyarakat maupun kebijakan pengelolaan desa wisata.
3. Organisasi, dapat ditentukan dari organisasi yang terbentuk untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat.
4. Sumber daya manusia, dapat ditentukan dari partisipasi sumber daya manusia dalam mengikuti program pemberdayaan masyarakat dan keaktifan sumber daya manusia dalam mengelola desa wisata.

5. Modal usaha yang dimiliki, dapat ditentukan dari kemampuan sumber daya dalam melihat peluang dan potensi pasar serta tersedianya modal usaha dalam pengelolaan desa wisata

1.8 Argumen Penelitian

Penelitian ini mengangkat topik pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Desa Wisata Cikakak menjadi satu-satunya desa wisata dengan kategori maju di Kabupaten Banyumas. Desa Cikakak baru diresmikan sebagai desa wisata pada tahun 2020 melalui Keputusan Bupati Banyumas Nomor /556/166/Tahun 2020 tetapi di akhir tahun 2021 Desa Cikakak berhasil meraih beberapa penghargaan seperti Desa Wisata Terbaik Jawa Tengah serta masuk dalam 50 desa wisata Anugerah Desa Wisata Indonesia dengan 7 indikator penilaian dari Kemenparekraf. Kondisi tersebut dicapai melalui strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata yang dijalankan oleh Pokdarwis Saka Tunggal dan BUMDes Mitra Usaha Sejahtera dengan melibatkan seluruh masyarakat melalui pembentukan pokja-pokja.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan dalam program pemberdayaan melalui desa wisata yang ditujukan untuk menciptakan kemandirian masyarakat. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengikuti pelatihan pengelolaan pariwisata masih menjadi tantangan untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan. Pelibatan generasi muda dalam melestarikan budaya sebagai potensi desa juga masih kurang karena belum adanya kemauan. Belum adanya peningkatan kunjungan wisatawan

dilihat dari awal diresmikannya Desa Cikakak sebagai desa wisata hingga Desa Cikakak menjadi desa wisata maju di Kabupaten Banyumas.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memberikan gambaran pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas yang dideskripsikan penulis menggunakan data-data yang ada.

1.9.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah tempat peneliti dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi dan data mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata dengan lokasi penelitian terletak di Desa Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas.

Alasan pengambilan lokasi penelitian di Desa Cikakak yaitu keberhasilan Desa Cikakak menjadi desa wisata dengan kategori maju di Kabupaten Banyumas dan beberapa pencapaian lainnya seperti Desa Wisata Terbaik di Jawa Tengah di tahun 2021 dan masuk dalam 50 desa wisata kategori Anugerah Desa Wisata Indonesia dengan strategi pengelolaan melalui pemberdayaan masyarakat. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi pengelola yaitu partisipasi masyarakat masih rendah dalam mengikuti program pemberdayaan dan kurangnya antusias yang berkelanjutan. Kurangnya keterlibatan generasi muda dalam

melestarikan budaya yang ada. Selain itu, belum adanya peningkatan kunjungan wisatawan dilihat dari awal diresmikannya Desa Cikakak sebagai desa wisata hingga Desa Cikakak menjadi desa wisata maju di Kabupaten Banyumas.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan dimana diperoleh data penelitian. Subjek dapat berarti orang atau apa saja yang menjadi sumber data penelitian. Orang yang menjadi subjek penelitian disebut juga sebagai informan. Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik *purposive sampling*. Teknik pengambilan sampel ini berdasarkan pertimbangan orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini adalah orang yang terlibat langsung proses pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Cikakak dimana merancang dan melaksanakan secara langsung sehingga bisa memberikan informasi yang valid.

Subjek penelitian ini yaitu Pokdarwis Saka Tunggal selaku pengelola lapangan Desa Wisata Cikakak dan BUMDes Mitra Usaha Sejahtera selaku pengelola manajemen Desa Wisata Cikakak sebagai informan kunci. Sedangkan untuk informan pendukung yaitu Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas, Pemerintah Desa Cikakak, dan masyarakat.

1.9.4 Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini ialah data kualitatif. Data tersebut berbentuk teks, laporan, gambar, suatu cerita, perilaku seseorang, tindakan, serta fenomena pada kehidupan sosial. Data juga bisa berbentuk hasil transkrip *interview* yang dijalankan penulis, catatan lapangan serta data yang didapatkan dari dokumentasi.

1.9.5 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua bagian yaitu :

1. Data Primer

Data primer ialah sumber data penelitian yang didapatkan secara langsung melalui sumber pertama atau tidak melewati perantara. Data primer ialah data yang diperoleh secara objektif risetnya. Data primer secara khusus dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipan. Peneliti melakukan wawancara kepada informan kunci yaitu Pokdarwis Saka Tunggal dan BUMDes Mitra Usaha Sejahtera dan informan pendukung yang mencakup Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas, Pemerintah Desa Cikakak, dan masyarakat. Observasi dilakukan di Desa Wisata Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas untuk melakukan pengamatan terhadap aktivitas dan kejadian tertentu yang

terjadi dengan datang langsung agar mendapatkan data atau informasi sesuai dengan yang dilihat dan kenyataan di lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang didapatkan melalui beragam sumber informasi secara tidak langsung melalui media perantara ataupun pihak ketiga. Data sekunder bisa berbentuk catatan, bukti, ataupun pelaporan historis yang sudah disusun dalam arsip atau data dokumenter. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumentasi melalui artikel, jurnal, buku, dokumentasi, dan internet yang memiliki keterkaitan terhadap penelitian yang dijalankan yakni pemberdayaan masyarakat pada pengelolaan desa wisata.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah langkah yang sangat strategis pada penelitian guna memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data dijalankan guna mencukupi standar yang ditentukan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui :

1. Wawancara

Wawancara dijalankan guna memahami pengertian mendasar pada interaksi yang spesifik. Untuk mengetahui dan memperoleh data yang dibutuhkan peneliti melakukan wawancara terkait dengan pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Penulis melakukan wawancara dengan berbagai *stakeholders*

terkait dengan informan kunci yaitu Pokdarwis Saka Tunggal dan BUMDes Mitra Usaha Sejahtera. Serta untuk informan pendukung yaitu Dinpurabudpar Kabupaten Banyumas; Pemerintah Desa Cikakak, dan masyarakat.

2. Observasi

Observasi adalah sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Peneliti melakukan observasi untuk mengumpulkan data dan memperoleh gambaran terkait pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Cikakak.

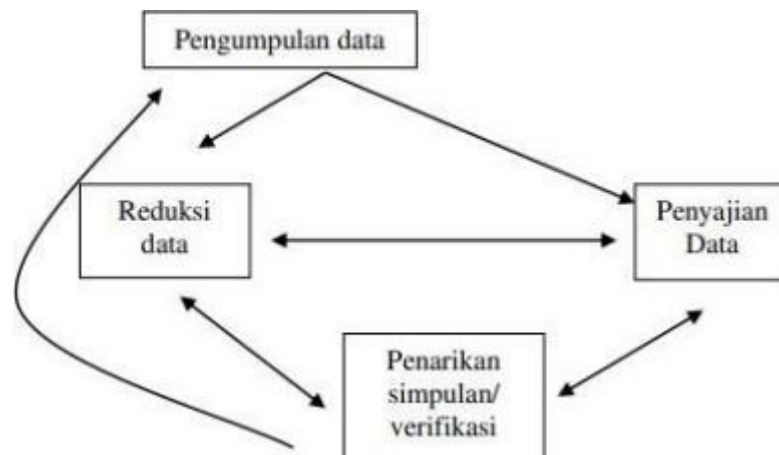
3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan informasi atau data-data melalui pengujian arsip dan dokumen. Dalam penelitian ini peneliti melengkapi penelitian melalui dokumentasi dengan memperoleh dan memperkuat data tentang pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Cikakak seperti dokumen arsip, jurnal, transkrip, agenda, dan data lain yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data ialah aktivitas pencarian, penyusunan, serta pendeskripsian data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi serta data-data yang lain secara sistematis sehingga dapat dipahami, dimengerti, dan bermanfaat.

Gambar 1.6 Analisis Data Model Miles dan Huberman



Sumber : Sugiyono (2016:246)

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan dengan menggunakan model Model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016:246) yakni reduksi data, penyajian data, serta penarikan simpulan ataupun verifikasi yang dipaparkan sebagai berikut:

1. Reduksi Data / *Data Reduction*

Tahapan reduksi ialah tahapan analisis data yang tujuannya untuk membantu penulis mengartikan data yang didapatkan. Reduksi data dijalankan melalui penyeleksian semua data dari wawancara, observasi serta dokumentasi, selanjutnya dilakukan pengolahan terhadap seluruh data mentah menjadi sesuatu yang lebih bermakna.

2. Penyajian Data / *Data Display*

Dalam penelitian ini data yang telah teroganisir disajikan dalam bentuk deskripsi informasi yang sistematis dalam bentuk narasi dan tabel, dari bentuk informasi yang kompleks menjadi sederhana namun selektif.

3. Penarikan Kesimpulan / *Verification*

Penarikan kesimpulan dilakukan untuk memberi arti atau memaknai data yang diperoleh baik dari observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Analisis data dilakukan setelah data terkumpul melalui siklus yang bersifat interaktif antara peneliti dan data-data yang diperoleh di lapangan.

1.9.8 Kualitas Data

Kualitas data atau yang lebih dikenal dengan keabsahan data dalam penelitian digunakan untuk membuktikan bahwasanya data yang didapatkan bisa dipertanggungjawabkan kesungguhannya melalui verifikasi data. Maka untuk keabsahan data penulis menggunakan triangulasi sumber dari beberapa sumber berbeda yang dipilih penulis dalam mendapatkan data. Hal tersebut mengacu pada pengecekan data dari informan, dari waktu yang berbeda-beda, dari berbagai tempat, dan dari situasi sosial yang berbeda-beda.